

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING MELALUI PROGRAM DAYCARE RUMAH PELITA DI KECAMATAN
SEMARANG UTARA TAHUN 2024**

Bintang Ayu Santika¹, Dewi Erowati²

Email : bintangayusantika@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 50139

Telepon (024) 74655407, Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Stunting di Kecamatan Semarang Utara masih menunjukkan angka kasus yang tinggi dibandingkan wilayah lain di Kota Semarang, meskipun berbagai upaya penanganan telah dilakukan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa intervensi yang bersifat sektoral belum mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor. Pemerintah kemudian menghadirkan Program *Daycare* Rumah Pelita sebagai bentuk implementasi *Collaborative Governance* dalam upaya percepatan penurunan *stunting*. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses kolaborasi antar aktor serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, melibatkan Dinas Kesehatan, Puskesmas Bandarharjo, Nutrisionis, HIMPSI Jawa Tengah, serta Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *Collaborative Governance* dalam pelaksanaan Program *Daycare* Rumah Pelita di Kecamatan Semarang Utara berjalan cukup baik, ditandai dengan tindakan kolaboratif antar aktor yang tidak dapat dilakukan secara mandiri. Kolaborasi ini tercermin dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan yang melibatkan non pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam kelas parenting. Selain itu, pelaksanaan program berlangsung secara sistematis melalui alur kerja yang jelas dan berkelanjutan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan program dan evaluasi. Program ini juga memberikan dampak berupa penurunan angka *stunting*. Namun, terdapat kendala berupa keterbatasan SDM, rendahnya partisipasi masyarakat, dan belum adanya keterlibatan sektor swasta sehingga kolaborasi masih bersifat terbatas (*limited collaboration*). Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas SDM, perluasan keterlibatan sektor swasta, dan penguatan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Proses Kolaborasi, Percepatan Penurunan *Stunting*, *Daycare* Rumah Pelita

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

² Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

ABSTRACT

Stunting cases in North Semarang District still show a high number compared to other areas in Semarang City, despite various management efforts. This condition indicates that sectoral interventions have not been able to produce optimal results, so a collaborative approach involving various actors is needed. The government then introduced the Rumah Pelita Daycare Program as a form of Collaborative Governance implementation in an effort to accelerate stunting reduction. This study aims to analyze the collaboration process between actors and the obstacles faced in program implementation. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through observation, interviews, and documentation, involving the Health Office, Bandarharjo Community Health Center, nutritionists, HIMPSI Central Java, and the community. The results of the study indicate that the Collaborative Governance process in the implementation of the Rumah Pelita Daycare Program in North Semarang District is running quite well, marked by collaborative actions between actors that cannot be carried out independently. This collaboration is reflected in the implementation of health checks involving non-governmental organizations and community participation in parenting classes. Furthermore, program implementation is carried out systematically through a clear and sustainable workflow, starting from the planning stage, program implementation, and evaluation. This program also has an impact in the form of a reduction in stunting rates. However, challenges include limited human resources, low community participation, and the absence of private sector involvement, resulting in limited collaboration. This study recommends improving human resource capacity, expanding private sector involvement, and strengthening community participation to enhance program effectiveness and sustainability.

Keywords: *Collaborative Governance, Collaboration Process, Accelerating Stunting Reduction, Rumah Pelita Daycare*

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan suatu negara karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap warga negara memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang memadai sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan akses layanan kesehatan belum merata, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Tingginya jumlah penduduk, kondisi sosial

ekonomi yang rendah, lingkungan permukiman yang kurang layak, serta keterbatasan lapangan pekerjaan menjadi faktor yang memperumit permasalahan kesehatan. Salah satu permasalahan kesehatan yang menjadi perhatian utama pemerintah adalah *stunting*. *Stunting* merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak yang ditandai dengan tinggi badan di bawah standar usia akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga pada perkembangan kognitif anak, sehingga berpotensi menurunkan

kualitas sumber daya manusia di masa depan. Faktor penyebab *stunting* bersifat multidimensional, meliputi kondisi ibu selama kehamilan, seperti kekurangan gizi dan infeksi, serta kondisi anak setelah lahir, seperti kurangnya asupan gizi dan riwayat penyakit. Selain itu, faktor sosial ekonomi seperti kemiskinan juga turut mempengaruhi tingginya angka *stunting*.

Permasalahan *stunting* tidak hanya menjadi isu nasional, tetapi juga merupakan isu global. Berdasarkan laporan UNICEF, WHO, dan World Bank Group, pada tahun 2022 terdapat sekitar 148,1 juta anak balita di dunia mengalami *stunting* atau setara dengan 22,3% dari total balita global. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa *stunting* menjadi tantangan serius dalam pembangunan kesehatan dunia. Dampak jangka panjang dari *stunting* dapat menghambat kemampuan anak dalam belajar, menurunkan produktivitas, serta meningkatkan risiko penyakit di masa dewasa.

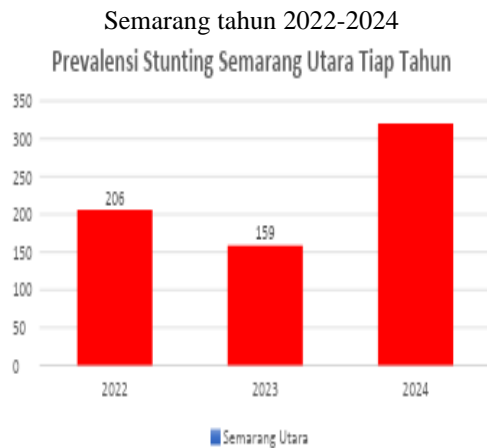
Di Indonesia, prevalensi *stunting* menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, yaitu dari 24,4% pada tahun 2021 menjadi 21,6% pada tahun 2022 dan 21,5% pada tahun 2023. Meskipun demikian, angka tersebut masih tergolong tinggi dan belum mencapai target nasional sebesar 14% pada tahun 2024.

Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong percepatan penurunan *stunting* melalui berbagai kebijakan dan program yang terintegrasi. Salah satu wilayah yang menjadi prioritas adalah Provinsi Jawa Tengah, yang termasuk dalam kategori daerah dengan jumlah penduduk tinggi sehingga memiliki risiko permasalahan *stunting* yang lebih kompleks. Sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang turut menghadapi permasalahan *stunting* yang cukup serius. Pemerintah Kota Semarang berkomitmen untuk menurunkan angka *stunting* melalui berbagai program inovatif yang melibatkan berbagai sektor. Namun demikian, data menunjukkan bahwa angka prevalensi *stunting* di Kota Semarang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penanganan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif dan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif.

Ketimpangan kasus *stunting* juga terlihat pada tingkat kecamatan, salah satunya di Kecamatan Semarang Utara yang memiliki angka kasus tertinggi dibandingkan wilayah lain. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus *stunting* di Kecamatan Semarang Utara mengalami penurunan pada tahun 2023, namun kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2024. Kondisi ini menjadikan

Kecamatan Semarang Utara sebagai wilayah prioritas dalam penanganan *stunting*.

Gambar 1. 1 Angka Prevalensi *Stunting* di Kota



Sumber : Portal satu data Indonesia tingkat Kota Semarang, 2024

Faktor penyebab tingginya angka *stunting* di wilayah ini antara lain kepadatan penduduk, kondisi lingkungan yang kumuh, keterbatasan akses air bersih, serta tingkat ekonomi masyarakat yang relatif rendah. Selain itu, wilayah pesisir yang rentan terhadap banjir rob turut memperburuk kondisi sanitasi dan kesehatan masyarakat. Sebagai upaya percepatan penurunan *stunting*, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* yang menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi dan kolaboratif. Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 45 Tahun 2023. Salah

satu implementasi dari kebijakan tersebut adalah Program *Daycare* Rumah Pelita, yang dirancang sebagai upaya intervensi komprehensif dalam penanganan *stunting*.

Program *Daycare* Rumah Pelita berfokus pada pemenuhan gizi anak, perbaikan pola asuh, serta edukasi kepada orang tua melalui kelas parenting. Program ini tidak hanya memberikan layanan pengasuhan anak, tetapi juga mencakup pemeriksaan kesehatan rutin, stimulasi tumbuh kembang, serta pemantauan pasca program. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan program ini mampu memberikan dampak signifikan dalam menurunkan angka *stunting*, khususnya di Kecamatan Semarang Utara.

Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai aktor, baik dari sektor pemerintah, tenaga kesehatan, organisasi profesi, maupun masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak tersebut mencerminkan penerapan konsep *collaborative governance*, yaitu proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Melalui pendekatan ini, diharapkan permasalahan *stunting* yang bersifat kompleks dapat ditangani secara lebih efektif.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, *collaborative governance* tidak selalu berjalan dengan optimal. Terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya keterlibatan sektor swasta. Selain itu, perbedaan kepentingan antar aktor juga dapat menjadi hambatan dalam proses kolaborasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kepercayaan antar pihak, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis *collaborative governance* dalam upaya percepatan penurunan *stunting* melalui Program *Daycare* Rumah Pelita di Kecamatan Semarang Utara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai proses kolaborasi yang terjadi, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program.

KAJIAN TEORI

1. Teori *Collaborative Governance*

Collaborative governance merupakan pendekatan tata kelola yang menekankan kerja sama antara pemerintah dengan pemangku kepentingan non-pemerintah, seperti sektor swasta dan masyarakat, dalam menyelesaikan permasalahan publik.

Pendekatan ini berfokus pada proses pengambilan keputusan yang bersifat partisipatif, deliberatif, dan berorientasi pada konsensus guna mencapai tujuan bersama. Emerson dan Nabatchi (2015) mendefinisikannya sebagai proses dan struktur pengambilan keputusan serta manajemen kebijakan publik yang melibatkan lintas sektor untuk mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai secara individual.

Praktik *collaborative governance* telah banyak diterapkan dalam berbagai sektor, seperti peningkatan pemberian ASI eksklusif dan penanganan permukiman kumuh, yang menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh sinergi antar aktor serta kesediaan untuk mengesampingkan kepentingan individual. Menurut Emerson dan Nabatchi (2015), proses *collaborative governance* terdiri dari tiga komponen utama, yaitu dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi.

1. Dinamika Kolaborasi

Dinamika kolaborasi merupakan proses interaksi yang menjadi dasar terbentuknya kerja sama antar aktor. Komponen ini mencakup tiga aspek utama, yaitu penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas untuk melakukan

tindakan bersama. Penggerakan prinsip bersama melibatkan proses *discovery* (pengungkapan kepentingan), *deliberation* (diskusi dan pertukaran gagasan), serta *determination* (pengambilan keputusan bersama). Selanjutnya, motivasi bersama ditunjukkan melalui adanya kepercayaan, pemahaman bersama, legitimasi internal, dan komitmen antar aktor. Sementara itu, kapasitas untuk melakukan tindakan bersama berkaitan dengan ketersediaan prosedur yang jelas, kepemimpinan yang efektif, distribusi pengetahuan, serta dukungan sumber daya yang memadai.

2. Tindakan Kolaborasi

Tindakan kolaborasi merupakan implementasi nyata dari proses kolaborasi yang telah dibangun. Pada tahap ini, seluruh aktor berkontribusi secara aktif sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing. Tindakan kolaborasi bersifat sinergis dan adaptif, dimana setiap pihak perlu menyesuaikan diri terhadap dinamika dan tantangan yang muncul di lapangan. Keberhasilan tahap ini sangat bergantung pada kemampuan aktor

dalam bekerja sama secara efektif untuk menghasilkan solusi konkret terhadap permasalahan publik.

3. Dampak dan Adaptasi

Dampak merupakan hasil yang dihasilkan dari proses kolaborasi, baik berupa dampak positif maupun negatif. Dampak positif ditunjukkan melalui tercapainya tujuan program, sedangkan dampak negatif dapat muncul akibat hambatan dalam proses kolaborasi. Selanjutnya, hasil tersebut menjadi bahan evaluasi melalui proses monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas program. Proses ini menghasilkan umpan balik yang kemudian diadaptasi sebagai dasar perbaikan dan penguatan kolaborasi di masa mendatang.

Pemilihan teori *collaborative governance* dari Emerson dan Nabatchi dalam penelitian ini didasarkan pada kemampuannya dalam menjelaskan proses kolaborasi secara komprehensif, mulai dari interaksi antar aktor, implementasi tindakan, hingga dampak dan adaptasi yang dihasilkan. Dengan demikian, teori ini relevan untuk menganalisis pelaksanaan kolaborasi dalam upaya percepatan penurunan *stunting* melalui Program *Daycare* Rumah Pelita.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena *collaborative governance* dalam pelaksanaan Program *Daycare* Rumah Pelita di Kecamatan Semarang Utara. Untuk lokasi penelitian berada di Dinas Kesehatan Kota Semarang dan *Daycare* Rumah Pelita di Kecamatan Semarang Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansinya dengan fokus penelitian serta kemudahan dalam memperoleh data lapangan yang akurat. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan keterlibatan langsung dalam program. Informan terdiri dari unsur pemerintah (Dinas Kesehatan Kota Semarang), tenaga kesehatan (Puskesmas Bandarharjo dan nutrisisionis program), organisasi profesi (HIMPSI Jawa Tengah), serta masyarakat sebagai penerima manfaat program.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif berupa informasi deskriptif yang diperoleh melalui dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara mendalam dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, buku, jurnal,

serta publikasi ilmiah yang relevan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lebih lanjut teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyederhanakan dan menyeleksi data yang relevan, kemudian disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan agar mudah dipahami. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang didukung oleh data yang valid dan konsisten.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dan member checking. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan metode, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, member checking dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil temuan kepada informan guna memastikan akurasi dan kredibilitas data. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai *collaborative governance* dalam upaya percepatan penurunan *stunting*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan *collaborative governance* dalam Program *Daycare* Rumah Pelita di Kecamatan Semarang Utara menunjukkan bahwa kolaborasi antar aktor telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Analisis dilakukan berdasarkan tiga komponen utama menurut Emerson dan Nabatchi, yaitu dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi

1. Dinamika Kolaborasi

Dinamika kolaborasi menjadi fondasi utama dalam keberhasilan kerja sama antar aktor. Pada tahap penggerakan prinsip bersama, para aktor yang terlibat seperti Dinas Kesehatan, tenaga kesehatan, organisasi profesi, dan masyarakat telah memiliki kesamaan tujuan, yaitu percepatan penurunan *stunting*. Proses *discovery* terlihat dari kesadaran bersama bahwa *stunting* merupakan permasalahan serius di Kecamatan Semarang Utara yang memerlukan penanganan lintas sektor. Selanjutnya, *deliberation* diwujudkan melalui forum koordinasi dan diskusi antar pihak untuk merumuskan langkah-langkah program. Hasil dari proses ini (*determination*) tercermin dalam pelaksanaan Program *Daycare* Rumah Pelita sebagai solusi inovatif.

Pada aspek motivasi bersama, kolaborasi didukung oleh adanya kepercayaan antar aktor, terutama antara

pemerintah dan tenaga profesional. Kepercayaan ini terbentuk melalui interaksi yang berkelanjutan dan komitmen dalam menjalankan program. Selain itu, terdapat pemahaman bersama mengenai pentingnya penanganan *stunting* secara komprehensif. Namun demikian, masih terdapat kendala pada aspek partisipasi masyarakat yang belum sepenuhnya aktif, sehingga mempengaruhi kekuatan motivasi kolektif.

Selanjutnya, pada kapasitas untuk melakukan tindakan bersama, program ini telah memiliki struktur kelembagaan dan prosedur yang jelas, termasuk Standar Operasional Prosedur (SOP). Pemerintah berperan sebagai pemimpin yang menginisiasi dan mengoordinasikan kolaborasi. Selain itu, dukungan pengetahuan dari tenaga kesehatan dan organisasi profesi menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program. Namun, keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala utama yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program di lapangan.

2. Tindakan Kolaborasi

Tindakan kolaborasi merupakan implementasi nyata dari proses kolaborasi yang telah dibangun. Dalam Program *Daycare* Rumah Pelita, tindakan kolaborasi terlihat dari berbagai kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi, seperti

pemeriksaan kesehatan anak, pemenuhan gizi, serta pelaksanaan kelas parenting bagi orang tua. Program ini tidak hanya berfokus pada anak, tetapi juga pada peningkatan kapasitas orang tua dalam pola pengasuhan. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif. Selain itu, keterlibatan organisasi profesi seperti tenaga psikologi memberikan kontribusi dalam aspek perkembangan anak dan edukasi keluarga.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan, seperti rendahnya tingkat partisipasi sebagian masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap program. Kondisi ini menuntut adanya strategi komunikasi dan sosialisasi yang lebih efektif. Selain itu, tidak adanya keterlibatan sektor swasta menyebabkan keterbatasan dalam hal sumber daya, baik dari segi pendanaan maupun inovasi program. Akibatnya, tindakan kolaborasi yang terjadi masih didominasi oleh sektor pemerintah dan kesehatan.

3. Dampak dan Adaptasi

Dari sisi dampak, Program *Daycare* Rumah Pelita memberikan hasil yang cukup positif dalam upaya penurunan *stunting* di Kecamatan Semarang Utara. Hal ini terlihat dari adanya perbaikan status gizi anak serta peningkatan pengetahuan

masyarakat mengenai pola asuh dan pemenuhan nutrisi. Program ini juga memberikan dampak sosial berupa meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan anak. Namun demikian, dampak yang dihasilkan belum sepenuhnya merata karena masih terdapat kendala dalam implementasi program, seperti keterbatasan SDM dan partisipasi masyarakat. Selain itu, fluktuasi angka *stunting* menunjukkan bahwa hasil program masih memerlukan penguatan agar lebih konsisten.

Dalam aspek adaptasi, pemerintah dan aktor terkait telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas program. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk perbaikan program, seperti peningkatan sosialisasi dan penguatan koordinasi antar aktor. Proses adaptasi ini menunjukkan bahwa *collaborative governance* bersifat dinamis dan terus berkembang sesuai dengan kondisi lapangan.

Secara keseluruhan, *collaborative governance* dalam Program *Daycare* Rumah Pelita telah berjalan cukup baik namun masih berada pada tahap *limited collaboration*. Hal ini ditandai dengan belum optimalnya keterlibatan seluruh aktor, khususnya sektor swasta, serta masih

adanya kendala dalam partisipasi masyarakat dan ketersediaan sumber daya. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi, diperlukan penguatan pada aspek keterlibatan multi-aktor, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta strategi pemberdayaan masyarakat yang lebih intensif. Jika hal tersebut dapat diwujudkan, maka *collaborative governance* berpotensi menjadi pendekatan yang efektif dalam percepatan penurunan *stunting* secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan *collaborative governance* dalam Program *Daycare* Rumah Pelita di Kecamatan Semarang Utara menunjukkan bahwa proses kolaborasi telah berjalan cukup baik. Hal ini ditandai dengan keterlibatan berbagai aktor dalam kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan dan kelas parenting, serta adanya alur pelaksanaan program yang sistematis mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu dimaksimalkan seperti pelaksanaan kolaborasi yang masih didominasi oleh sektor kesehatan dan hubungan antar aktor cenderung tidak setara atau dapat dikategorikan sebagai *limited collaboration*. Dinas Kesehatan berperan sebagai aktor utama yang memiliki

kewenangan lebih besar dalam menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan program. Di sisi lain, tidak adanya keterlibatan sektor swasta secara penuh. Meskipun terdapat upaya awal melalui pemberian fasilitas tetapi keterlibatan tersebut tidak berlanjut, karena kepentingan pemerintah dan swasta tidak terbangun dalam pelaksanaan program.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan kolaborasi meliputi kapasitas dan komitmen pemerintah, sinergi lintas sektor, serta ketersediaan anggaran yang memungkinkan program berjalan secara gratis. Sementara itu, faktor penghambat yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum adanya keterlibatan sektor swasta. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kolaborasi multi-aktor, peningkatan kapasitas SDM, serta strategi peningkatan partisipasi masyarakat guna mendukung efektivitas program secara berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, upaya peningkatan efektivitas *collaborative governance* dalam percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Semarang Utara perlu dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah, khususnya Dinas Kesehatan Kota Semarang, perlu

mempertimbangkan penambahan jumlah sumber daya manusia, terutama nutrisisionis dan pengasuh di *Daycare* Rumah Pelita, agar proses intervensi terhadap anak dapat dilakukan secara lebih optimal dan tidak memerlukan waktu yang lama. Kedua, peningkatan partisipasi masyarakat perlu dilakukan melalui pendekatan edukatif dan persuasif yang berkelanjutan, guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya program serta mengurangi penolakan terhadap intervensi yang diberikan. Ketiga, pemerintah perlu mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pelaksanaan program, misalnya melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga dapat mendukung pemenuhan fasilitas dan memperluas aktor yang terlibat dalam kolaborasi. Dengan demikian, kolaborasi yang terbangun tidak lagi bersifat terbatas, melainkan lebih inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjar., dkk. (2024). *Stunting*. Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative Governance in theory and practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4).
- Astuti., dkk. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Tim DAP Press.
- Emerson., dan Nabatchi. (2015). *Collaborative Governance*. Washington, DC: Georgetown University Press.
- Haryono, N. (2012). Jejaring untuk membangun kolaborasi sektor publik. *Jurnal Jejaring Administrasi Publik*, IV(1).
- Hidayasa., dkk. (2023). *Collaborative Governance* Dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Bintan. *Jurnal JAPS*. 4(2).
- Kurniasih., dkk. (2023). *Collaborative Governance* Dalam Percepatan Pencegahan *Stunting* di Kabupaten Temanggung. *Journal of Public Administration and Local Governance*. 7(1).
- Noor, M., dkk. (2022), *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Bildung.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.
- Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Di Kota Semarang.
- Vihma, dan Toikka. (2021). The Limits Of *Collaborative Governance*: The Role Of Inter-Group Learning And Trust In The Case Of The Estonian “Forest War.” [vihma2021.pdf](#). Diunduh pada tanggal 29 Maret 2026 pukul 12.20 WIB.